

BAB II. TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN UNTUK MASYARAKAT

II.1 Landasan Teori tentang Keadaan Darurat

Salah satu teori yang melandasi perancangan ini adalah keadaan darurat. Keadaan darurat secara umum adalah keadaan yang mendesak, memerlukan penanganan segera dan terjadi tanpa ada kesiapan sebelumnya. Departemen Tenaga Kerja (dalam Fajri, 2009: 1) memperjelas keadaan darurat sebagai kondisi yang ditimbulkan diluar dari kewajaran yang biasa dihadapi oleh masyarakat serta dapat memberikan gangguan dalam aktivitas sehari-hari. Lebih lanjut di dalam sumber jurnal yang sama, dijelaskan secara rinci bahwa keadaan darurat dapat disebabkan oleh huru hara dan kegagalan teknis dari aktivitas manusia serta kegagalan teknis seperti kebakaran.

Untuk menangani keadaan darurat diperlukan beberapa tahapan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2008, h.17) menjelaskan bahwa: "Tahap Tanggap Darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna menghindari bertambahnya korban jiwa. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
- Penentuan status keadaan darurat bencana;
- Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- Pemenuhan kebutuhan dasar;
- Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital."

II.1.1 Keadaan Darurat Berdasarkan Kategorinya

Keadaan darurat dibagi menjadi beberapa kategori, tergantung dari besar kerugian dan kesulitan penanganannya. Departemen Tenaga Kerja di tahun 1987 (dalam Fajri, 2009: 1) menyebutkan 3 kategori mengenai keadaan darurat dalam tingkatan.

Tingkat I merupakan kondisi yang dapat ditangani secara mandiri oleh petugas atau tenaga ahli di lapangan. Kerugian yang ditimbulkan relatif ringan namun tetap berpotensi menghasilkan bahaya yang lebih besar terhadap manusia dan harta benda. Pada tingkat II, kinerja petugas dan tenaga ahli memerlukan bantuan dari masyarakat di sekitarnya karena tidak mampu mengendalikan bencana dengan skala yang sudah besar. Keadaan darurat ini melumpuhkan aset yang besar serta menyebabkan korban jiwa berjatuhan. Tingkat III mempunyai dampak yang lebih besar dari keadaan darurat tingkat II sehingga dibutuhkan penanganan dalam skala nasional.

II.2 Objek Perancangan

II.2.1 Bencana

Di samping keadaan darurat yang menjadi landasan teori dalam laporan ini, ada bencana yang menjadi objek perancangan. Bencana hampir pasti disebabkan oleh alam dan tidak terkontrol oleh manusia kecuali kebakaran. Bencana merupakan peristiwa yang besar dan disebabkan oleh dampak buruk dari aktivitas alam serta kegiatan manusia itu sendiri. Skala kerugian bencana diperparah akibat ketidakmampuan manusia dalam menangani kerugian materiil dan immateril yang dihasilkan (Wiarso, 2013, h.3). Didalam buku yang sama dijelaskan bahwa definisi bencana menurut UU No, 24 tahun 2007 adalah: Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (h.4). Oleh karena itu, bencana dapat disimpulkan sebagai musibah yang sulit ditangani oleh manusia karena kerugian yang ditimbulkan cukup parah.

II.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bencana

Telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa bencana adalah musibah yang dapat disebabkan oleh kelalaian manusia dan gejala alam. Dikutip dari situs <http://www.bpd.sukoharjokab.go.id> dalam buku sebelumnya (dalam Wiarso, 2017, h. 8) bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana adalah kemampuan

penanganan yang rendah di berbagai lini masyarakat, kerentanan infrastruktur dan masyarakat itu sendiri serta bahaya yang disebabkan oleh aktivitas alam dan manusia.

Terdapat poin yang penting dalam keterangan tersebut yaitu tentang kerentanan. Semakin tinggi kerentanan maka bencana akan semakin menghasilkan kerugian yang besar. Rijanta dkk, (seperti dikutip oleh Choirunisa & Giyarsih, tanpa tahun, h. 2) menerangkan bahwa: "Kerentanan adalah ketidakmampuan suatu individu atau kelompok masyarakat dalam upaya meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh suatu bahaya". Terdapat pembagian tingkat kerentanan seperti yang dijelaskan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 bahwa ada kerentanan fisik dimana bahaya menyerang kerawanan secara fisik seperti listrik dan jalan, kerentanan sosial kependudukan dimana indikator kerawanan bahaya mengancam tingkat sosial seperti demografi penduduk, kerentanan ekonomi yang mengancam kegiatan ekonomi masyarakat dan kerentanan lingkungan yang mengancam sumber daya alam. Oleh karena itu, ada baiknya masyarakat mengontrol tingkat kerentanan terhadap bencana agar selalu berada pada level yang paling bawah.

II.2.3 Bencana dan Penanganannya

Di saat terjadi peristiwa bencana, ada pihak yang menjadi korban, ada orang-orang yang menangani (petugas dan tenaga ahli) dan sisanya merupakan masyarakat umum. Walaupun tidak ikut menangani, setidaknya masyarakat tetap harus memiliki pengetahuan dan kesiapan mengenai hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi sebuah bencana apalagi jika petugas dan tenaga ahli tersebut terlambat untuk datang ke area bencana dan situasi menjadi lebih darurat dan tanggung jawab sementara dibebankan kepada masyarakat. Dalam sebuah jurnal ilmiah telah dijelaskan bahwa menurut Nurjanah (seperti dikutip oleh Wicaksono, 2019, h.14) "masyarakat harus memiliki pengetahuan, keterampilan etika moral, sikap dan komitmen tentang penanggulangan bencana".

Adapun kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat saat terjadi sebuah bencana adalah memberikan perlindungan, tempat mengungsi dan segala keperluan yang dibutuhkan oleh korban, serta melakukan penyelamatan dan pemulihan harta benda serta lingkungannya. Dengan upaya tersebut kerugian dan dampaknya dapat ditangani dengan segera oleh masyarakat. (Wiarso, 2017, h.20).

II.2.4 Kebakaran

Kebakaran dapat dikategorikan sebagai bencana yang sulit dihindari akibat 3 faktor yang saling berhubungan yaitu kelalaian masyarakat, benda yang menjadi sumber panas api dan alam. Kebakaran adalah hasil dari reaksi yang berlebihan antar unsur-unsur dalam benda yang menimbulkan energi panas lalu reaksi tersebut berubah menjadi api dan menjalar ke lingkungan sekitarnya apalagi terdapat benda-benda yang dapat mempercepat proses kebakaran (Wiarso, 2017, h. 45). Menurut sumber yang lainnya, Ramli (seperti dikutip oleh Rasmani, Wahyuningsih & Widiastuti, 2021, h. 2) menyebutkan bahwa “kebakaran adalah api yang tidak terkendali yang meluap dan menyebabkan kerugian”. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebakaran adalah bencana yang disebabkan oleh lalapan api dan menimbulkan kerugian yang bervariasi mulai dari kerusakan bangunan sampai dengan korban jiwa.

II.2.5 Klasifikasi Kebakaran

Masyarakat sebaiknya memahami bahwa bencana kebakaran mempunyai klasifikasi masing-masing. Dengan mengetahui hal tersebut maka masyarakat dapat mengontrol perilakunya saat terjadi bencana kebakaran sesuai dengan klasifikasi yang ada. Hermawan (2020, h. 3) menjelaskan bahwa: ”Tujuan klasifikasi kebakaran adalah agar memudahkan usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran. Klasifikasi kebakaran digunakan untuk memilih media (bahan) pemadam yang tepat dan sesuai bagi suatu kelas kebakaran, sehingga usaha pencegahan dan pemadaman akan tepat”. Terdapat 3 jenis kebakaran yang yang harus diperhatikan. Kebakaran kelas A disebabkan oleh benda padat yang mudah terbakar. Untuk memadamkannya diperlukan prosedur yang standar seperti alat pemadam kebakaran dan air. Sedangkan kebakaran kelas B disebabkan oleh benda cair yang

mudah terbakar, sehingga memerlukan penambahan prosedur seperti pemakaian pasir untuk sebagai upaya pemadaman. Kebakaran kelas C disebabkan oleh sumber listrik yang menimbulkan energi panas sehingga prosedur untuk mematikan sumber listrik tersebut harus dilakukan (Wiarso, 2017, h. 48). Lebih lanjut terdapat 4 klasifikasi kebakaran menurut NFPA, yaitu:

1. Kelas A yaitu kebakaran dari bahan yang mudah terbakar, seperti kayu, kain, kertas, karet, dan plastik.
2. Kelas B yaitu kebakaran dari cairan yang mudah terbakar, seperti gemuk minyak bumi, minyak, minyak berbasis cat, pelarut, alkohol, dan gas yang mudah terbakar.
3. Kelas C yaitu kebakaran yang melibatkan energi peralatan listrik.
4. Kelas D yaitu kebakaran dari logam yang mudah terbakar, seperti magnesium, titanium, zirkonium, natrium, lithium, dan kalium.
5. Kelas K yaitu kebakaran dari peralatan memasak dengan menggunakan media yang mudah terbakar seperti sayuran atau minyak hewani dan lemak.

II.2.6 Penyebab Kebakaran

Perlu dipahami bahwa unsur kesengajaan oleh manusia dalam bencana kebakaran adalah hal yang sulit ditemukan. Kelalaian manusia untuk mengelola benda-benda disekitarnya merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kebakaran. Suprpto (dalam Mantra, 2005, h. 25) telah disebutkan bahwa:

Penyebab kebakaran utama adalah hubungan arus pendek listrik 39,4%, kompor minyak tanah 20% dan lampu tempel 9%. Tidak jarang kebakaran juga disebabkan oleh hal sepele seperti putung rokok (Suprpto, 1998: 10). Kebakaran terbanyak terjadi pada bangunan rumah tinggal 65,8% kemudian disusul bangunan pusat perbelanjaan dan pertokoan 9,3%, selanjutnya bangunan industri (7,2%) dan pertokoan (6,5%)

Sesuai dengan batasan masalah dan keterangan di atas maka perancangan ini akan berfokus pada kebakaran yang terjadi di pemukiman karena bila dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain, intensitas kebakaran di pemukiman memang

memiliki tingkat kerentanan yang tinggi disebabkan oleh kepadatan penduduk serta jumlah bangunannya.

II.2.7 Skala Kebakaran

Seperti bencana-bencana yang lainnya, kebakaran adalah musibah yang mempunyai tingkat kerugian yang berbeda-beda, tergantung dari tempat dan kadar bahaya yang disebabkan oleh lalapan api. Melalui skala kebakaran, masyarakat dapat menempatkan perilakunya secara tepat saat menyaksikan bencana kebakaran. Berikut adalah data yang telah dihimpun dari situs Kemnaker (berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA, KEP. 186/MEN/1999, 29 September 1999):

Tabel II.1 Daftar Jenis Tempat Kerja Berdasarkan Klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran
 Sumber: https://jdih.kemnaker.go.id/data_wirata/1999-3-2.pdf
 (Diakses pada 2021)

KLASIFIKASI	JENIS TEMPAT KERJA
<p>Bahaya Kebakaran Ringan</p> <p>Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar rendah, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga menjalarnya api lambat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat ibadah - Gedung/ruang perkantoran - Gedung/ruang pendidikan - Gedung/ruang perumahan - Gedung/ruang perawatan - Gedung/ruang restoran - Gedung/ruang perpustakaan - Gedung/ruang perhotelan - Gedung/ruang lembaga - Gedung/ruang rumah Sakit - Gedung/ruang museum - Gedung/ruang penjara
<p>Bahaya Kebakaran Sedang</p> <p>Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang sehingga menjalarnya api sedang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir - Pabrik elektronika - Pabrik roti - Pabrik barang gelas - Pabrik minuman - Pabrik permata - Pabrik pengalengan - Binatu - Pabrik susu

<p>Bahaya Kebakaran Sedang</p> <p>Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan dengan tinggi lebih dari 4 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga menjalarnya api sedang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penggilingan padi - Pabrik bahan makanan - Percetakan dan penerbitan - Bengkel mesin - Gudang pendinginan - Perakitan kayu - Gudang perpustakaan - Pabrik barang keramik - Pabrik tembakau - Pengolahan logam - Penyulingan - Pabrik barang kelontong - Pabrik barang kulit - Pabrik tekstil - Perakitan kendaraan bermotor - Pabrik kimia (bahan kimia dengan kemudahan terbakar sedang) - Pertokoan dengan pramuniaga kurang dari 50 orang
<p>Bahaya Kebakaran Sedang 3</p> <p>Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi, sehingga menjalarnya api cepat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang pameran - Pabrik permadani - Pabrik makanan - Pabrik sikat - Pabrik ban - Pabrik karung - Bengkel mobil - Pabrik sabun - Pabrik tembakau - Pabrik lilin - Studio dan pemancar - Pabrik barang plastik - Pergudangan - Pabrik pesawat terbang - Pertokoan dengan pramuniaga lebih dari 50 orang - Penggergajian dan pengolahan kayu - Pabrik makanan kering dari bahan tepung - Pabrik minyak nabati - Pabrik tepung terigu

	<ul style="list-style-type: none"> - Pabrik pakaian
<p>Bahaya Kebakaran Berat</p> <p>Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menyimpan bahan cair, serat atau bahan lainnya dan apabila terjadi kebakaran apinya membesar dengan melepaskan panas tinggi, sehingga menjalarnya api cepat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang pameran - Pabrik kimia dengan kemudahan terbakar tinggi - Pabrik kembang api - Pabrik korek api - Pabrik cat - Pabrik bahan peledak - Pemintalan benang atau kain - Penggajian kayu dan penyelesaiannya menggunakan bahan mudah terbakar - Studio film dan Televisi - Pabrik karet buatan - Hanggar pesawat terbang - Penyulingan minyak bumi - Pabrik karet busa dan plastik busa

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa bangunan yang dihuni dan pemanfaatan gedung oleh masyarakat adalah ciri khas dari sebuah pemukiman. Skala kebakaran yang terjadi di tempat tersebut digolongkan sebagai bahaya ringan, karena sumber panas yang dapat memicu api mempunyai jumlah yang sedikit sehingga tingkat kecepatan api yang menyebar dalam kebakaran lambat. Namun pada klasifikasi bahaya berikutnya, skala kebakaran lebih berat dengan bumbungan api yang dapat mencapai tinggi beberapa meter dan didominasi oleh tempat-tempat yang mempunyai sumber pemicu panas api menjadi kebakaran seperti pabrik dan studio. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi pemukiman yang dekat bangunan tersebut karena kebakaran di pemukiman mempunyai karakteristik tersendiri. Selanjutnya Ramli (dalam Sujatmiko, 2012: 12) menjelaskan bahwa kebakaran di pemukiman itu mempunyai ciri-ciri seperti sumber api berupa benda padat, jenis apinya terbuka atau di luar ruangan, tidak menyediakan alat-alat pemadam kebakaran dan sumber air yang memadai serta masyarakat yang penuh dengan keragaman umur, perilaku dan tingkat sosial sehingga menyulitkan petugas Damkar.

II.2.8 Tahapan Terjadinya Kebakaran

Masyarakat yang memahami karakteristik sebuah bencana adalah masyarakat yang mempunyai inisiatif dalam melakukan tanggap darurat untuk lingkungan dan sesamanya. Tahapan bencana kebakaran adalah hal yang harus diketahui oleh masyarakat. Sarjono & Sumardjo (dalam Wiarto 2017, h. 46) menjelaskan bahwa: ”ada 4 tahapan yang yang diungkapkan dalam buku pendidikan jasmani, olahraga dan rekreasi sebagai berikut:

1. Tahap awal

Dimulai dari sejak proses pembakaran dengan kontak atau persenyawaan antara sumber panas dengan bahan bakar yang disertai dengan adanya oksigen yang berada disekelilingnya. Misalnya seseorang akan membakar sampah, sebelum terbakar sampahnya pasti orang tersebut akan menggunakan bantuan bahan bakar seperti minyak untuk mempermudah proses penyalaan api.

2. Tahap penyalaan serempak

Tahap peralihan antara tahap awal dan tahap penuh yang ditandai dengan terjadinya penyalaan secara serempak didalam ruangan yang terkurung.

3. Tahap penuh

Api mulai berkembang secara penuh yaitu membakar bahan yang mudah terbakar dan bahan bakar yang berdekatan dengan intensitas maksimum.

4. Tahap surut

Dalam tahapan surut ini api kebakaran mulai menurun secara perlahan-lahan karena menipisnya persediaan bahan bakar dan oksigen. Jika persediaan oksigen habis, api kebakaran akan berangsur-angsur padam. Begitu pula jika bahan bakar atau bahan yang mudah terbakar habis”.

II.2.9 Landasan Hukum tentang Bencana Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran dalam perancangan ini belum mempunyai peraturan tertulis atau Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masyarakat mengenai hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi bencana kebakaran. Namun, terdapat beberapa landasan hukum yang telah dibuat oleh negara Indonesia dan dapat dijadikan sebagai tinjauan bila masyarakat ingin mengetahui konsekuensi yang didapat bila

melakukan tindakan yang kurang tepat saat terjadi bencana kebakaran melalui peraturan yang lebih memaksa sesuai dengan undang-undang. Pasal 189 menyebutkan bahwa: Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas- perkakas atau alat- alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (kejari-sukoharjo.go.id, tanpa tahun, h. 27). Salah satu contoh tindakan yang memberikan dampak negatif saat terjadi bencana kebakaran adalah kerumunan. Masyarakat seringkali memadati area kebakaran untuk hanya sekedar menonton saja dan bahkan lalu lalang di sekitar TKP. Sebelum atau saat petugas Damkar mencapai area tersebut untuk melakukan penanggulangan bencana kebakaran, terdapat oknum-oknum yang menaiki alat transportasi yang perilakunya sama dengan masyarakat tersebut. Padahal telah disebutkan bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 134 disebutkan bahwa:

Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. Ambulan yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sekretariat Jenderal DPR RI, tanpa tahun, h. 71).

II.2.10 Kebakaran dan Penanganannya

Kebakaran adalah bencana yang memerlukan penanganan yang cepat dan tepat. Hal yang paling penting untuk dilakukan saat terjadi bencana kebakaran adalah

meminta pertolongan. Masyarakat tidak boleh menganggap remeh bencana ini, apapun skalanya karena bahaya akan didapat bila melakukan tindakan sendiri tanpa pengawasan petugas Apabila kebakaran sudah terjadi, hal-hal yang harus dilakukan adalah meminta pertolongan saat terjadi tanda-tanda dari kebakaran, menjaga tubuh dari kepulan asap dan menjauh ke tempat yang aman (Wiarso, 2017, h. 51).

II.3 Data Lapangan

Pada awalnya metode yang digunakan adalah campuran namun karena pencarian data yang kurang optimal maka arah perancangan ini diubah menjadi kualitatif. Lebih lanjut dijelaskan oleh Hary & Jonathan (2007) bahwa “data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif, bukan angka. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian ataupun peristiwa yang kemudian akan dianalisis dalam bentuk kategori-kategori” (h.98). Dengan demikian, hasil wawancara dan dokumentasi dari berbagai sumber serta argumen dan data yang sudah didapatkan dari keduanya dalam bab ini selanjutnya akan diberikan analisa pada bagian resume dan solusi perancangan.

II.3.1 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data kualitatif. Suatu literasi buku yang berjudul Metodologi Penelitian menjelaskan bahwa wawancara menurut Gulö (2000) adalah “bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden” (h. 119). Oleh karena itu, wawancara diperlukan dalam perancangan ini agar mendapatkan informasi secara langsung dari sumber pertama. Teknik pengumpulan data ini dilakukan kepada pihak dinas yang terkait dalam penanggulangan bencana kebakaran setempat serta pencarian dokumentasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

II.3.2 Deskripsi Data Wawancara

1. Toto Haryanto

Pengumpulan data berupa wawancara yang pertama telah dilakukan bersama Komandan Pleton 2 Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung pada tanggal 14 November 2018 di gedung Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, lantai 2. Dari wawancara tersebut didapatkan beberapa

pernyataan yaitu “memang benar bahwa kebiasaan menonton kecelakaan dan bencana itu terjadi, bahkan intensitasnya sering. Motivasi masyarakat yang terlihat di lapangan ada yang ingin membantu tetapi ada juga yang berniat jelek seperti mencuri. Kepadatan masyarakat terjadi mulai dari jalanan hingga area TKP dan memberi dampak yang negatif kepada petugas karena menghambat kinerjanya dalam hal waktu dan tenaga. Jumlah penonton yang memadati area seperti mall atau fasilitas umum itu cukup banyak bahkan dapat mencapai ribuan”. Sedangkan *feedback* yang diberikan oleh beliau adalah membolehkan masyarakat menonton bencana kebakaran namun sebelumnya memberi prioritas kepada petugas yang mulai dari berangkat sampai bekerja di area kebakaran. Dari pihak Dinas Pemadam Kebakaran sendiri sudah membuat pos-pos yang tersebar di kota Bandung dan sekitarnya agar mempersingkat perjalanan.

2. Agung

Petugas Damkar adalah narasumber yang penting karena mereka berhadapan langsung dengan suasana darurat antara korban, kebakaran dan masyarakat umum. Wawancara kedua telah dilakukan bersama dengan Agung selaku anggota atau petugas Damkar dari Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung UPT Wilayah Utara pada tanggal 24 Juli 2021 di gedung UPT Utara Dinas Kebakaran Kota Bandung. Dari wawancara tersebut didapatkan informasi berupa beberapa inti pernyataan yaitu “Dinas pemadam kebakaran tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) / peraturan tertulis mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan saat terjadi bencana kebakaran. Sosialisasi seperti tanggap darurat masih dilakukan lewat penyuluhan langsung ke setiap kelurahan. Penyuluhan yang diberikan adalah kesiapsiagaan dan tindakan awal untuk menangani bencana kebakaran. Namun sepertinya sosialisasi ini belum cukup untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang kurang tepat dilakukan oleh masyarakat saat terjadi bencana kebakaran sehingga masih mengganggu kinerja petugas Damkar. Berdasarkan hal tersebut, petugas Damkar memberikan beberapa himbauan untuk perancangan ini kepada penulis mengenai hal tersebut seperti selalu menelepon Dinas Pemadam Kebakaran sebagai penanganan pertama, jangan terlalu dekat

dengan petugas Damkar dan area kebakaran, dan bila petugas Damkar sudah datang maka serahkan saja sepenuhnya urusan memadamkan api tersebut kepada petugas”.



Gambar II.1 Pasca wawancara dengan petugas Agung
Sumber: Dokumentasi pribadi (2021)

II.3.3 Dokumentasi

Perancangan ini menggunakan dokumentasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk mendukung hasil data wawancara yang sudah dilakukan. Lebih jelasnya, setelah mendapatkan data primer yang cukup berupa wawancara maka langkah pengumpulan data selanjutnya dapat menambahkan sumber-sumber sekunder. Data sekunder adalah data-data yang dapat dibaca, disaksikan atau didengarkan seperti foto (Hary & Jonathan, 2017, h. 98). Metode pengumpulan data ini dipilih karena penulis maupun faktor luar lainnya tidak mempengaruhi informasi yang didapat, biaya lebih sedikit dan menjangkau kejadian di masa lampau. Dokumentasi tersebut menampilkan masyarakat dan khalayak sasaran dengan berbagai tindakan yang dilakukan saat terjadi bencana kebakaran.



Gambar II.2 Kebakaran Terjadi di Pasar Gedebage Bandung, Senin (03/9/2018)
Sumber: http://cdn2.tstatic.net/jabar/foto/bank/images/kebakaran-melanda-pasar-gedebage-bandung-senin-0392018_20180903_174212.jpg
(Diakses pada 29 April 2019)

Pada gambar di atas terlihat bahwa ada peristiwa kebakaran yang terjadi di sebuah pasar dan dekat dengan pemukiman. Terdapat banyak orang yang berkerumun untuk menonton bencana tersebut. Pada bagian kanan bawah gambar ada beberapa anak-anak yang ikut menyaksikan. Walaupun sudah berdiri pada jarak yang relatif jauh, masyarakat memuaskan rasa ingin tahu dengan melihat atau mengabadikan momen tersebut dengan gawai meski kepulan asap masih dapat mencapai kerumunan tersebut.



Gambar II.3 Kebakaran Rumah di Jl. AH Nasution Bandung, Senin (05/17/2021)
Sumber: <https://twitter.com/kebakaranbdg/status/1394253221086916608>
(Diakses pada 2021)

Gambar di atas merupakan hasil tangkap layar dari video yang diunggah oleh akun Twitter resmi Damkar Bandung. Lokasi kejadian berada di Jl. AH Nasution no 101, Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung pada pukul 18.10 WIB. Ini merupakan contoh yang lain mengenai sikap masyarakat yang kurang tepat akibat ketidaktahuan mengenai hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi bencana kebakaran. Jumlah orang yang memadati tidak terlalu besar dibandingkan dengan gambar yang pertama. Namun dari gerakan masyarakat yang sedang berjalan dan semakin mengurangi jarak antara dirinya dengan area

kebakaran sudah memperlihatkan intensi masyarakat untuk tidak mengindahkan bahaya dari mendekati bencana kebakaran.



Gambar II.4 Kebakaran Rumah di Jl. Babakan Irigasi Bandung, Rabu (04/28/2021)
Sumber: <https://twitter.com/kebakaranbdg/status/1387119818235469824>
(Diakses pada 29 April 2019)

Namun, gambar di atas selanjutnya menjelaskan hal yang berbeda. Pada peristiwa kebakaran rumah di Jl. Babakan Irigasi, Kelurahan Babakan Tarogong, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung tersebut hanya sedikit warga yang tampaknya berada dekat sekali dengan bangunan yang terbakar. Warga tidak hanya memuaskan rasa ingin tahunya dengan menonton bencana tersebut namun juga berusaha memadamkan api dengan cara mengambil air melalui ember. Itu sudah memperlihatkan bahwa pada gambar di atas warga dapat melakukan tanggap darurat bencana kebakaran secara tepat walaupun hanya mengandalkan inisiatif.



Gambar II.5 Informasi Lapangan Mengenai Bahaya Mendekati Area Kebakaran
Sumber: <https://twitter.com/kebakaranbdg/status/1395046300886867978>
(Diakses pada 29 April 2019)

Sementara itu, ada contoh nyata mengenai akibat yang didapat bila tidak dapat melakukan hal yang tepat saat terjadi bencana kebakaran. Menurut informasi dari @pak.damkar_medan (seperti dikutip oleh akun Twitter Damkar Bandung di @kebakaranbdg, 2021) “Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 12 Mei 2021 di kota medan, stlh petugas damkar kota medan tiba di lokasi tersebut sedikit terjadi kerusuhan antara masyarakat dengan mengambil alih *nozzel* lalu memancarkan sendiri, baru di pancarkan”.

II.4 Analisis

Berdasarkan data dari dokumentasi dan hasil wawancara diatas sudah jelas bahwa dampak positif akan didapatkan bila masyarakat dapat melakukan tanggap darurat bencana kebakaran dan dampak negatif akan didapatkan bila hal tersebut tidak diperhatikan. Terdapat banyak kebiasaan masyarakat yang kurang tepat seperti berkerumun, tidak menelepon petugas Damkar dan berada terlalu dekat dengan area kebakaran tersebut. Akibatnya dapat menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti ledakan yang membuat api meluas dan mengenai orang-orang tersebut. Sehingga jumlah korban dan kerugian materiil yang harusnya dapat ditangani dan diminimalisir oleh petugas Damkar akhirnya bertambah.

II.5 Resume

Hasil observasi berupa wawancara diatas dari sudut pandang petugas di Dinas Pemadam Kebakaran maupun dokumentasi yang didapat menunjukkan bahwa masyarakat masih belum mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi bencana kebakaran. Pada intinya kerumunan yang memberikan dampak negatif tersebut di setiap bencana kebakaran hampir pasti selalu ada karena masyarakat hanya ingin memuaskan rasa penasaran. Walaupun masih ada sebagian kecil yang melakukan tindakan yang memberikan dampak positif, masyarakat bertindak sesuai dengan inisiatif semata bukan karena peraturan tertulis atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Terdapat kesesuaian dengan identifikasi masalah yang terdapat di dalam perancangan ini bahwa peraturan yang khusus mengatur hal tersebut belum dapat diberikan sehingga masyarakat masih mendapatkan pengetahuan yang minim mengenai hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi bencana kebakaran. Apalagi manusia yang mempunyai kebiasaan yang pasti yaitu ingin meniru apa yang dia lihat di hadapannya. Dapat dipastikan setelah menerima peraturan tertulis atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, masyarakat pada akhirnya akan mengetahui apa saja hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi bencana kebakaran sehingga mampu untuk melakukan tindakan yang dapat memberikan contoh yang baik bagi sesamanya serta memberikan dampak positif untuk korban, lingkungan dan petugas Damkar.

II.6 Solusi Perancangan

Terakhir adalah sesuai dengan analisis hasil observasi dan resume yang ada, tanggap darurat bencana kebakaran merupakan hal yang cukup kompleks dan mungkin hanya dipahami oleh masyarakat yang sudah dewasa. Perlu ada solusi berupa perancangan informasi kepada anak-anak yang menjadi khalayak sasaran dalam perancangan ini agar anak-anak mengetahui apa saja hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi bencana kebakaran sesuai dengan tingkat pemahamannya. Media yang digunakan juga harus menarik perhatian, simpel namun jelas dalam memberikan informasi dan tetap menghibur.